BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

Pertama, proses perumusan kebijakan penyetaraan harga ini bermula dari ketidakkompakan para santri *abdi dalem* dalam hal memberi harga. Berdasarkan rasionalisasi masing-masing *abdi dalem*nya, mampu mempengaruhi kebijakan masing-masing warung dengan harga yang variatif sesuai versinya. Rasionalitas mereka berupa faktor ekonomi dan humanis, yang paling dominan adalah faktor kekuatan *barakah.*

Dengan diselenggarakannya evaluasi setiap tahun, pada akhirnya bertransformasi menjadi kebijakan yang institusional berupa penyetaraan harga warung *dalem* di Pondok Pesantren Lirboyo. Prosesnya, pengurus Jam'iyyah Pusat Al-Khidmah selaku memiliki wewenang, mengundang setiap bos warung untuk berdiskusi bersama. Di samping itu, sebelum berada di waktu perumusan kebijakan, setiap pengelola warung *dalem* sudah mempersiapkan rasionalisasinya masing-masing (konsensus kelompok).

Sidang dimulai dengan menyebarkan selembaran data harga pasar oleh pengurus Jam'iyyah Al-Khidmah. Data tersebut diklaim validitas (ditawarkan) kepada seluruh santri *abdi dalem*. Adanya penawaran ini, terjadilah tindakan komunikatif dan argumentasi di antara santri *abdi dalem* untuk menemukan sebuah konsensus (pemahaman bersama).

Tidak ada dominasi aktor di dalam sidang tersebut. Yang ada hanyalah pertukaran rasionalisasi. Di situ, *dzuriyah* selaku struktur elit bukanlah dominasi di dalam forum, karena 'konteks' dalam forum itu sendiri lah yang menjadi legitimasi tindak-ucap para santri. Bahkan, sanksi dari kebijakan penyetaraan harga juga dirumuskan bersama dalam sidang tersebut.

Kedua, pemilik warung adalah *dzuriyah* sedangkan pengelolanya adalah santri *abdi dalem*. Berawal untuk meminimalisasi terjadinya persaingan (kompetisi) harga warung *dalem*, pengurus Jam'iyyah Pusat Al-Khidmah membuat kebijakan penyetaraan harga. Meski masih terdapat persaingan di dalam hal rasa, namun hal ini dirasa persaingan sehat.

Implementasi kebijakan penyetaraan harga makanan dan minuman di warung *dalem* sudah berjalan maksimal. Kebijakan ini mendapat respon positif dari para santri *abdi dalem*. *Dzuriyah* yang berwujud Badan Pembina Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo (BPK-P2L) sebagai agen yang paling dominan serta memiliki hak dalam melegitimasi kebijakan-kebijakan yang bersangkutan dengan kesejahteraan santri, termasuk santri *abdi dalem.* Signifikasinya berupa kebijakan penyetaraan harga.

Di samping itu, rasionalitas mereka sangat erat dengan motif kesadaran yang dimiliki individu. Terhadap aturan *dalem* maupun aturan pengabdi di warung *dalem*, santri *abdi dalem* memiliki alasan-alasan positif mengapa mereka mengikutinya, di antaranya adalah kesadaran diskursif bahwa aturan berupa kebijakan penyetaraan harga makanan memiliki *mashlahat* yang dapat dinikmati oleh semua elemen sosial, yaitu santri *abdi dalem* dan santri

umum. Di samping itu, harga yang distandarkan tergolong harga yang relatif murah.

Dzuriyah tidak mengintervensi apapun yang dilakukan oleh santri *dalem*nya karena beliau-beliau sudah mempercayakan itu semua kepada mereka. Karena setiap ruang-waktu masing-masing warung *dalem* dan pengelola yang berbeda-beda, maka melalui pengurus Jam'iyyah Al-Khidmah, seluruh warung diintegrasikan dalam masalah harga sebagai upaya penyejahteraan kepada warung-warung *dalem* yang minim konsumen. Sedangkan kontrol atas kebijakan ini yang paling berperan adalah aturan abstrak, yakni moral dan norma dunia pesantren Lirboyo yang membentuk prinsip: "Yang penting ada keuntungan meski sedikit dan tidak sampai rugi".

B. Saran

Banyaknya kebijakan yang belum bisa maksimal akibat perumusannya yang tidak melibatkan pihak dari objek kebijakan tersebut (*bottom-up*) akan berkonsekuensi melahirkan disharmonisasi. Yang pada akhirnya sering terjadi protes dari rakyat. Maka, perumusan harus bersifat *bottom-up* bukan *top down*. Sebagaimana yang dilakukan oleh pengurus Jamm'iyyah Pusat Al-Khidmah di Pondok Pesantren Lirboyo, bahwa seluruh agen yang bersangkutan diajak berdiskusi untuk menemukan konsensus bersama.

Selain itu, "sistem kepercayaan" menjadi faktor fundamental yang membentuk pola kerjasama terlepas dari kepentingan-kepentingan setiap pedagang. Konstruk kepercayaan yang paling signifikan adalah penanaman

nilai-nilai agama di hati masyarakat. Oleh karenannya, agama sebenarnya mengarahkan manusia kepada kehidupan yang humanis dan sosialistis serta meredam watak materialisme. Juga, pemimpin dikonstruk oleh agama sebagai orang yang berkedudukan terhormat sehingga rakyat pun rela dan percaya terhadap apapun interupsi dari pemimpin, ini sebuah analogi negara kecil di pondok pesantren.